

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS, EFFICIENCY AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAX REVENUE TO REGIONAL ORIGINAL INCOME IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF BOGOR REGENCY

Ade Budi Setiawan, Maria Magdalena Melani, Ismatius Tsaniyah
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Kode Pos 16720, Tel/Fax: (0251) 8245155
Ade.budi.setiawan.akt@unida.ac.id, Maria.magdalena@unida.ac.id,
Ismatus.tsaniyah2019@unida.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how much the level of effectiveness, efficiency and contribution of local tax revenue to local revenue (PAD) in the local government of Bogor regency. The unit of analysis in this study is the Bogor Regency Regional Budget and Expenditure Realization Report for the 2018-2021 fiscal year. The method used is a descriptive research method with a quantitative approach, using analysis of effectiveness, efficiency and contribution as an analytical tool. The results of this study indicate that the average level of effectiveness of Regional Tax receipts is 118.78 percent (very effective), the average level of efficiency of Regional Tax receipts is 7.22 percent (very efficient) and the average level of contribution of Regional Tax revenues to the Regional Original Revenue for the 2018-2021 fiscal year is 68.44 percent (very good).

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Contribution, Local Tax, Local Revenue, Regional Government of Bogor Regency*

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (BAPPENDA). Unit analisis pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2018 – 2021. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan analisa efektivitas, efisiensi dan kontribusi sebagai alat analisis. Hasil penelitian yang telah dilakukan mulai anggaran tahun 2018 sampai 2021 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah sebesar 118,78 persen (sangat efektif), rata-rata tingkat efisiensi sebesar 7,22 persen (sangat efisien) dan rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 68,44 persen dan menunjukkan hasil sangat baik.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam bidang ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk memperbaiki perekonomian daerah. Semakin naiknya kebutuhan hidup, populasi penduduk dan volume pembangunan merupakan suatu masalah dan beban pembangunan yang harus dicermati, hal tersebut menuntut peran Pemerintah berkesinambungan dalam hal upaya pemecahan masalah dan juga beban pembangunan. Meningkatnya suatu peran pemerintah untuk memecahkan masalah yang menyebabkan meningkatnya dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Nugroho, 2014).

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya merupakan keberhasilan otonomi daerah. Indikator utama suatu daerah untuk dapat memperoleh pendapatan daerah dengan pemanfaatan potensi daerah yang dimiliki sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengembangkan daerahnya baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pada Januari tahun 2001 kebijakan otonomi daerah secara efektif dilaksanakan. Kebijakan ini menimbulkan banyak reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Menanggapi peraturan otonomi daerah dengan antusias bagi pemerintah daerah yang mempunyai SDA yang melimpah. Pada perspektif lain, akan merasa khawatir bagi pemerintah daerah yang mempunyai SDA yang masih sedikit. Munculnya kekhawatiran dari pemerintah daerah terhadap kebijakan otonomi daerah adalah karena daerahnya masih sangat bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mandiri dalam aspek keuangan. Ketika PAD meningkat, maka pemerintah daerah dapat mampu mengembangkan daerahnya dengan mandiri, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, PAD adalah sumber penerimaan daerah yang sangat berpengaruh bagi peningkatan perekonomian daerah.

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama 4 tahun terakhir:

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi PAD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Sisa Target
2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	113	321.924.387.638
2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73	387.088.628.401
2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,11	347.533.590.731
2021	3.291.322.687.957	3.706.417.800.972	112,67	417.095.113.015

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor (Data Sekunder diolah 2022)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, diketahui adanya perubahan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan persentase realisasi total penerimaan PAD pada periode tahun 2018-2019 dengan tingkat kenaikan sebesar 14,7% namun kemudian terjadi penurunan presentase realisasi total penerimaan PAD periode tahun 2020-2021 dengan tingkat penurunan sebesar 3.62% lalu menurun kembali sebesar 1,44%, Melalui penjelasan tersebut terlihat bahwa potensi PAD Kabupaten Bogor cukup besar, hal ini dikarenakan selama 4 tahun terakhir jumlah PAD Kabupaten Bogor walaupun mengalami penurunan akan tetapi mampu melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Salah satu sumber PAD yang penting berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 2022, tentang Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi/ badan yang terutang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, digunakan untuk keperluan daerah dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut adalah Sumber-Sumber Penerimaan PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama 4 tahun terakhir:

Tabel 1 Sumber-Sumber Penerimaan PAD Kabupaten Bogor Anggaran Tahun 2018-2021

TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Kekayaan yang dipisahkan	Lain-lain pendapata yang sah	Total PAD
2018	1.969.427.530.834	112.792.280.192	44.287.173.198	670.953.129.414	2.797.460.113.638
2019	2.232.991.424.401	140.790.695.891	57.537.749.304	719.660.620.091	3.150.980.489.687
2020	1.857.411.776.716	128.914.969.533	67.102.677.276	756.725.928.757	2.810.155.352.282
2021	2.462.339.432.505	115.545.927.200	71.303.513.920	1.059.228.927.247	3.708.417.800.872

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor (Data sekunder diolah 2022)

Berdasarkan Tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa PAD dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan namun yang berasal dari Pajak Daerah di tahun 2020 semakin menurun sebesar Rp375.579.647.685, ditahun 2021 pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp604.927.655.789. Total PAD setiap tahun mengalami peningkatan namun hanya ditahun 2020 mengalami penurunan hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019.

Semakin tahun realisasi anggaran pajak daerah belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak. Menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya (Halim,2014). Berkaitan dengan hal itu, meningkatkan keuangan daerah perlu dilakukan, dengan cara peningkatan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan pajak daerah yang baik agar optimalisasi penerimaan PAD dikabupaten Bogor dapat terlaksana. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar Kabupaten Bogor dapat meyerap dan mengelola sumber-sumber penerimaan PAD, sehingga terlihat tingkat efektivitas, efisiensi dan besarnya kontribusi (sumbangan) penerimaan pajak daerah terhadap PAD dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin mengetahui kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terutama kontribusi/ sumbangan penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah otonom. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor”**

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theori

Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menjelaskan bahwa tujuan para manajemen lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu/ pribadi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan organisasi dan kesuksesan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku serta bersumber dari kekayaan dalam wilayahnya sendiri dan merupakan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan, dan dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang pajak daerah yang dimaksud pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan suatu Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Efektivitas

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan sasaran yang harus dicapai. Jika suatu kegiatan telah mencapai tujuan serta sasaran akhir yang telah direncanakan maka dikategorikan efektif. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi, demikian pula sebaliknya.

Efisiensi

Halim (2004), mengatakan bahwa efisiensi adalah sebagai pengukur besarnya suatu biaya pemungutan yang digunakan untuk realisasi penerimaan pajak daerah. Efisiensi menunjukkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Semakin kecil biaya pemungutan pajak daerah maka semakin efisien pemungutan pajak daerah dan juga sebaliknya.

Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris dari kata *contribute, contribution* yang mempunyai arti keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri, dan sumbangan. Kamus Ekonomi, Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya dan kerugian bersama. Halim (2014) menyatakan bahwa Kontribusi pajak daerah merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan pajak daerah untuk meningkatkan PAD.

METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah anggaran tahun 2018-2021 yang berasal dari Pajak Daerah. Lokasi Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tepatnya pada BAPPENDA Kabupaten Bogor. Dengan fokus penelitian tentang

Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bogor periode 2018-2021.

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Data Kuantitatif yaitu data yang berupa angka lalu di analisis menggunakan teknik teori komperatif.

Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis horizontal yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan penerimaan pajak selama beberapa periode anggaran. Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka akan terlihat suatu peningkatan penerimaan pada pemerintah daerah dari beberapa periode (kasmir 2012).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiono, 2016). Subjek dalam penelitian ini adalah BAPPENDA Kabupaten Bogor, sedangkan objeknya adalah Pendapatan Asli Daerah anggaran tahun 2018-2021 yang berasal dari Pajak Daerah. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian antara lain:

Analisis Efektivitas

Halim (2017) efektivitas adalah mengukur berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas Pajak Daerah dihitung menggunakan presentase perbandingan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target penerimaan Pajak Daerah. Rumus efektivitas adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2011):

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan}}{\text{Target penerimaan pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan adalah:

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	Cukup Efektif
>60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006

Analisis Efisiensi

Efisiensi menunjukkan keberhasilan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi pajak daerah adalah perbandingan antara input (penerimaan) dan output (biaya pemungutan penerimaan). Analisis Efisiensi pajak daerah dihitung untuk mengetahui perbandingan biaya pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Rumus efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi adalah:

Tabel 4 Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10-20%	Efisien
21-30%	Cukup Efisien
31-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak efisien

Sumber: Mahmudi (2011)

Analisis Kontribusi

Halim (2002) menyatakan bahwa Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan/ kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah terhadap PAD sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan atau tindakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Rumus kontribusi pajak daerah terdapat penerimaan PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi Pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai besarnya kontribusi atau sumbangan penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dapat diinterpretasikan pada kriteria sebagai berikut:

Tabel 5 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327.2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Hasil Penerimaan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sumber-Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Penelitian ini hanya membahas sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Berikut ini adalah Pencapaian Hasil Penerimaan Pajak Daerah anggaran Tahun 2018-2021.

Tabel 6 Pencapaian Hasil Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Sisa Target	%
2018	1.687.912.794.000	1.969.427.530.834	116,68	281.514.736.834	16,68
2019	1.845.902.796.000	2.232.991.424.401	120,97	387.088.628.401	21,49
2020	1.576.416.115.000	1.857.411.776.716	117,82	280.995.661.716	17,82
2021	2.090.578.509.000	2.462.339.432.505	117,78	371.760.923.505	17,78

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor (Data sekunder diolah 2022)

Dari Tabel 6 diatas dijelaskan bahwa jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar Rp263.563.893.567 dari Rp1.969.427.530.834 menjadi Rp2.232.991.424.401 sedangkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp375.579.647.685 dari Rp2.232.991.424.401 menurun menjadi Rp1.857.411.776.716 lalu dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp604.927.655.789 dari Rp1.857.411.776.716 hingga Rp2.462.339.432.505. Meskipun penerimaan Pajak Daerah mulai tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dan penurunan namun, realisasi penerimaan melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah

Hasil analisis efektifitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor anggaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 akan dijabarkan dibawah ini:

1. Analisis Efektivitas

Berikut dibawah ini hasil perhitungan analisis efektifitas beserta kriterianya mulai tahun 2018 sampai tahun 2021:

Tabel 7 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah (%)

Tahun	Total Target Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2018	1.687.912.794.000	1.969.427.530.834	116,68%	Sangat Efektif
2019	1.845.902.796.000	2.232.991.424.401	120,97%	Sangat Efektif
2020	1.576.416.115.000	1.857.411.776.716	117,82%	Sangat Efektif
2021	2.090.578.509.000	2.462.339.432.505	117,78%	Sangat Efektif
	Rata-Rata		118,31%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2022

Dilihat dari Tabel 7 diatas segala keseluruhan tingkat Efektivitas dari tahun 2018-2021 dikategorikan sangat efektif dengan presentase rata-rata 118,31%. Efektivitas tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 120,97% sedangkan terendah pada tahun 2018 dengan nilai 116,68%. Tingkat efektifitas pajak di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,29% menjadi 120,97% kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 3,15% menjadi 117,82% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021 sebesar 0,04% menjadi 117,78%. Meskipun mulai tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan namun tetap memberikan hasil diatas 100% ini menunjukkan bahwa pajak daerah tergolong sangat efektif. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pajaknya.

2. Analisis Efisiensi

Perhitungan analisis efisiensi dengan cara melihat perbandingan biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan. Untuk analisis efisiensi ini jika nilai persentase semakin kecil (<10%) maka kategorinya akan semakin efisien. Berikut dibawah ini hasil perhitungan analisis efisiensi mulai tahun anggaran 2018 sampai 2021:

Tabel 8 Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah (%)

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2018	143.052.097.000	1.969.427.530.834	7,26%	Sangat Efisien
2019	156.384.126.000	2.232.991.424.401	7%	Sangat Efisien
2020	141.067.869.000	1.857.411.776.716	7,6%	Sangat Efisien
2021	173.082.229.471	2.462.339.432.505	7,02%	Sangat Efisien
	Rata-Rata		7,22%	Sangat Efisien

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan Tabel 8 di atas dilihat dari keseluruhan bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor anggaran tahun 2018-2021 dikategorikan sangat efisien dengan presentase rata-rata 7,22% dikategorikan sangat efisien. Tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 7,6% sedangkan terendah di tahun 2019 sebesar 7%. Efisiensi penerimaan pajak daerah di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,26% menjadi 7% kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 0,6% hal ini dikarenakan pandemi covid'19 yang menyebabkan semakin menurunnya realisasi penerimaan dan meningkatnya biaya pemungutan. Pada tahun 2021 efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor mengalami penurunan sebesar 0,58% menjadi 7,02%. Meskipun mulai tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan namun efisiensi penerimaan pajak daerah dengan presentase efisiensi dibawah 10%, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak sangat efisien.

3. Analisis Kontribusi

Analisis data kontribusi pajak daerah diterapkan dengan tujuan menjawab rumusan masalah serta untuk mengetahui besaran kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor, penerapan tersebut sebagai berikut:

Tabel 9 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2018	1.969.427.530.834	2.797.460.113.638	70,40%	Sangat Baik
2019	2.232.991.424.401	3.150.980.489.687	70,87%	Sangat Baik
2020	1.857.411.776.716	2.810.155.352.282	66,10%	Sangat Baik
2021	2.462.339.432.505	3.708.417.800.872	66,40%	Sangat Baik
	Rata-Rata		68,44%	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan 2022

Dilihat dari Tabel 9 di atas segala keseluruhan tingkat Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2018-2021 dikategorikan sangat baik dengan presentase rata-rata sebesar 68,44%. Tingkat kontribusi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 70,87% dan terendah di tahun 2020 sebesar 66,10%. Kontribusi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,47% dari 70,40% menjadi 70,87% kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 4,77% dari 70,87% menjadi 66,10% hal tersebut karena adanya pandemi covid'19, selanjutnya mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 sebesar 0,3% dari 66,10% menjadi 66,40%. Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan namun tetap memberikan hasil diatas 50% ini menunjukkan bahwa Kontribusi pajak terhadap PAD tergolong sangat baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD pada pemerintah daerah kabupaten bogor tahun 2018-2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian hasil penerimaan pajak daerah selama periode tahun 2018-2021 baik karna meskipun penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dan penurunan namun realisasi penerimaan melebihi target setiap tahunnya. Tahun 2020 mengalami penurunan dari segi target maupun realisasi hal tersebut di karnakan pandemi covid'19 yang menyebabkan menurunnya penerimaan di tahun 2020 namun hal tersebut tidak berlangsung lama dikarnakan pemerintah Kabupaten Bogor mampu menaikkan kembali penerimaan asli daerahnya.
2. Hasil analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Bogor tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa: analisis efektivitas dikategorikan sangat efektif, analisis efisiensi dikategorikan sangat efisien dan analisis kontribusi dikategorikan sangat baik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan masukan atau saran bagi penelitian selanjutnya dan Pemerintah Daerah diantaranya:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Daerah diharapkan mampu memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan basis data pajak dan terus menggali potensi pajak agar penerimaan pajak di Kabupaten Bogor menjadi lebih optimal, meningkatkan pengawasan terhadap aparatur pemerintah dalam bekerja dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan cara memberikan sosialisasi tentang hasil/bukti kinerja atas penyerapan penerimaan Pajak Daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam peneliti selanjutnya dapat menambah atau mencoba rasio lain seperti rasio kemandirian dan juga bisa meneliti penerimaan asli daerah yang lain, melakukan penelitian ini instansi/tempat yang berbeda agar bisa dijadikan referensi bagi instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Setiawan, E. Surtini. 2017. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akunida* ISSN 2442-3033 Volume 3 nomor 1.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. **Stewardship Theory Or Agency Theory: CEO Governance And Shareholder Returns**. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Halim A, 2014. **Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jeiny, 2020. Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). *Jurnal Jurusan Akuntansi*.
- Kasmir, 2012. **Analisis Laporan Keuangan**. PT. RAJA GRAFINDO PERSADA: Jakarta.
- Kepmendagri, Nomor 6990.900.327.2006. **Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.

- Nugroho, 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Menjadi Akuntan Publik (Study Kasus Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta). Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Regina, Suci. 2022. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Jurusan Akuntansi.
- Sugiyono, 2016. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: PT Alfabet.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 **tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 **Tentang Pemerintahan Daerah.**
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 **tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 **tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**